

**BAGELEN PASCA PERANG JAWA (1830-1950):  
Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi di Bekas Wilayah  
"Negaragung" Kasultanan Mataram Islam (*Vorstenlanden*)**

**Oleh:**

**Himayatul Ittihadiyah**

**Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga  
Jl. Marsda Adisutjipto Yogyakarta 55281**

**Abstract**

This paper aims at describing one of the Javanese Islam which is socio-politically and economically may be cited as the most dynamic regions during the period of one century. Bagelen, the former territory "negaragung" has been amended several times of a changing system of administration and two times a change of economic policy. First, (1830-1870), this period is called as cultivation system (*cultuurstelsel*). After the signing of the political contract 27 September 1830, as a result of the defeat of the Java War, there was the so-called 'transitional villages', the release of the coastal areas of the power of Mataram, including "mancanegara" Bagelen which was originally a granary for the Sultanate of Mataram both Surakarta and Yogyakarta later annexed by the colonial government. Administratively, the period saw a shift from the "mancanegara", a local residency under the authority of the Dutch East Indies colonial government, based in Batavia. The period saw a change in zoning throughout the residency and the addition of new officers to guide and oversee the workings of the indigenous population in the implementation of forced cultivation. This happens partly because of rapid population growth. Because the population is a potential resource then it can be harnessed to the interests of forced cultivation. Second, (1870-1950), in this period re-entering society Bagelen latest round, the period of liberal economic system, in this period they have to face the liberal patterns in various aspects of life, ranging from how to make a living, facing the industrialization of the owners of both private and government capital. At this period also administratively Bagelen be merged into the residency of Kedu (August 1, 1901). At the same time, as an Islamic society they also have to deal with an influx of new religions, namely Christianity, a religion which at that time known as the religion of the colonizers.

**Keywords:** Bagelen, region, Mataram.

### **Abstrak**

Tulisan ini mendeskripsikan salah satu kawasan Jawa Islam yang secara sosial politik dan ekonomi dapat disebut sebagai kawasan paling dinamis selama sekitar satu abad. Bagelen, bekas wilayah "negaragung" ini telah mengalami beberapa kali pergantian sistem administrasi dan dua kali pergantian kebijakan ekonomi. Pertama, (1830-1870), periode ini disebut periode sistem tanam paksa (*cultuurestelsel*). Setelah ditandatanganinya kontrak politik 27 September 1830, sebagai akibat dari kekalahan Perang Jawa, terjadilah apa yang disebut sebagai "peralihan nagari", terlepasnya daerah-daerah pesisir dari kekuasaan Mataram, termasuk di dalamnya "mancanegara". Bagelen yang semula merupakan lumbung padi bagi Kesultanan Mataram baik Surakarta maupun Yogyakarta kemudian dianeksasi oleh pemerintah kolonial. Secara administratif pada periode ini terjadi peralihan dari daerah "mancanegara", menjadi daerah karesidenan di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Dalam periode ini terjadi perubahan pembagian wilayah di seluruh karesidenan dan penambahan pejabat baru untuk membimbing dan mengawasi cara kerja penduduk pribumi dalam pelaksanaan tanam paksa. Hal ini terjadi antara lain karena pertambahan penduduk yang cepat. Karena penduduk merupakan sumber daya yang potensial maka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tanam paksa. Kedua, (1870-1950), pada periode ini masyarakat Bagelen kembali memasuki babak terbaru, yakni periode sistem ekonomi liberal, pada periode ini mereka harus menghadapi pola-pola liberal dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara memperoleh mata pencaharian, menghadapi industrialisasi dari para pemilik modal baik swasta maupun pemerintah. Pada periode ini pula secara administratif Bagelen harus bergabung ke dalam Karesidenan Kedu (1 Agustus 1901). Pada masa yang sama, sebagai masyarakat Islam mereka juga harus menghadapi arus masuknya agama baru, yakni agama Kristen, agama yang pada waktu itu dikenal sebagai agama para penjajah.

**Kata kunci:** Bagelen, wilayah, Mataram.

### **A. PENDAHULUAN**

Untuk memahami dinamika sejarah masyarakat Islam di Jawa, Bagelen adalah bagian dari kawasan yang teramat penting untuk dilewatkan, demikian juga waktu sejarah yang tidak bisa diabaikan adalah masa setelah berakhirnya Perang Jawa atau yang sering disebut Perang Diponegoro. Perang Jawa atau perang Diponegoro (1825-1830) merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Kesultanan Mataram, yakni perang antar elite Jawa dan elite Kolonial

yang didukung oleh pasukan pengikut Pangeran Diponegoro yang memberontak akibat tekanan-tekanan politik dan ekonomi yang dilakukan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Perang yang bernuansa mistis Jawa Islam dengan konsep ratuadilisme ini menjadi trauma politik yang berdampak terhadap pertimbangan-pertimbangan politik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selanjutnya, baik menyangkut kebijakan ekonomi, politik, maupun keagamaan di kawasan pulau Jawa.

Bagelen, adalah potret dari wilayah dinamis yang selalu menjadi rebutan para elite politik --yang dalam hal ini banyak mengalami perubahan status secara administrasi politik-- sejak zaman pra-kolonial hingga zaman kolonialisme liberal. Dalam tulisan ini Bagelen akan dikaji dalam rentang waktu setelah berakhirnya Perang Jawa, yang secara kebijakan politik dan ekonomi dapat disebut sebagai masa-masa yang banyak mengalami perubahan. Dengan berlalunya Perang Jawa atau perang Diponegoro, masyarakat Islam di Bagelen yang *nota bene* secara mayoritas adalah masyarakat petani, mulai memasuki babak baru dalam sejarah kolonial di Jawa, yakni zaman *culturstelsel* atau tanam paksa (1830-1870). Memasuki masa ini mereka harus menghadapi berbagai perubahan secara struktural maupun kultural, baik secara social, politik, ekonomi, budaya, maupun agama. Secara kehidupan sosial ekonomi jelas mereka harus beradaptasi dengan sistem baru, yakni sistem *culturstelsel*. Sistem ini telah memaksa mereka untuk mengubah pola kehidupan sehari-hari. Pada masa ini wilayah Bagelen berubah status dari kawasan monconegoro dari Kasultanan Mataram di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta menjadi Karesidenan Bagelen, menjadi Karesidenan baru di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dan dijadikannya sebagai lahan perkebunan nila (indigo) terbesar di pulau Jawa. Dengan kebijakan tersebut maka masyarakat petani pemilik lahan persawahan di Bagelen tidak memiliki kebebasan untuk mengolah lahan tanah mereka sesuai dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jika sejak zaman prakolonial Bagelen sudah dikenal sebagai wilayah lumbung padi bagi Kasultanan Mataram (*Vorstenlanden*), maka berbeda ketika Bagelen memasuki masa kebijakan *cultruurstelsel*, mereka tidak diperkenankan lagi untuk menanam tanaman padi sebagaimana sebelumnya, karena sebagian besar lahan persawahan yang mereka miliki harus dijadikan lahan perkebunan nila (indigo).

Kebijakan sistem *culturstelsel* yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut pada kemudian hari membawa berbagai dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan mereka sehari-hari karena berubahnya pola kerja masyarakat. Pola pengolahan lahan perkebunan sangat berbeda dengan pengolahan lahan persawahan. Alhasil pola semacam ini sangat merugikan masyarakat petani karena mereka harus beradaptasi kepada sistem baru yang sangat berbeda dengan sistem sebelumnya.

Setelah kegagalan sistem *culturstelsel*, yang kemudian disusul dengan babak berikutnya yakni sistem ekonomi liberal (1870-1950) masyarakat kembali memasuki babak baru atau babak terbaru dalam sejarah Bagelen, yakni suatu masa ketika mereka harus menghadapi pola-pola liberal dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara memperoleh mata pencaharian, menghadapi industrialisasi dari para pemilik modal baik swasta maupun pemerintah, termasuk ketika mereka harus menghadapi arus masuknya agama baru, yakni agama Kristen, agama yang pada waktu itu dikenal sebagai agama yang dibawa dan dianut oleh para penjajah, yakni bangsawan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dengan berlakunya sistem liberal perubahan di berbagai bidang pun mulai tampak bermunculan. Orang-orang Belanda mulai semakin memperluas wilayah kekuasaan, dan di wilayah itu pula mereka mulai semakin menyelenggarakan pemerintahan secara langsung. Kehidupan orang-orang pribumi pun semakin dipengaruhi oleh ekonomi, teknik, dan ilmu pengetahuan Barat. Walaupun di sisi lain kesadaran sebagai orang-orang Indonesia pun mulai tumbuh, meningkat seiring dengan digulirkannya sistem ekonomi liberal.

Kebijakan pemerintah kolonial yang selalu berganti-ganti sebelumnya, baik mengenai wilayah dan juga peraturan penggunaan tanah yang terlalu sering terjadi secara bergantian sangat mempengaruhi tata kehidupan dan perilaku serta kebudayaan masyarakat di seluruh pelosok Jawa, terutama sekali di wilayah-wilayah yang dijadikan perkebunan pada masa diberlakukannya sistem tanam paksa,

Di daerah Bagelen ini masyarakat Islam sudah mulai tumbuh sejak zaman Kasultanan Mataram Islam ketika dipimpin oleh Sultan Agung, namun semenjak hilangnya kekuasaan Kasultanan Mataram Islam atas wilayah tersebut, disusul dengan berganti gantinya

kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dari sistem *cultuurstelsel* hingga sistem ekonomi liberal, mereka mulai dihadapkan kepada perubahan-perubahan yang bersifat struktural atau fundamental, mulai dari perubahan sosial politik, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk perubahan yang sangat fundamental adalah secara keagamaan, yakni ketika mereka harus mulai menghadapi berbagai arus kristenisasi, baik melalui lembaga pemerintah maupun swasta.

## B. SEKILAS TENTANG WILAYAH GEOGRAFIS BAGELEN

Dalam catatan arsip-arsip Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Bagelen sering disebut dengan nama Bagelon, Bagalein, atau juga Baglen. Ketiga sebutan ini menunjukkan tempat yang sama, yakni Bagelen yang secara geografis terletak di pantai bagian selatan Jawa Tengah. Antara 109° 12' dan 110° 11' garis Bujur Timur dan antara 7° dan 7° 57' garis Lintang Selatan. Ia dikelilingi oleh Karesidenan Pekalongan dan Semarang di perbatasan bagian utara, di sebelah timur berbatasan dengan Karesidenan Kedu dan Kesultanan Yogyakarta, dan karesidenan Banyumas di sebelah Barat, di sebelah selatan dibatasi oleh Lautan Hindia (Samodera Indonesia), serta Tegal di sebelah Barat lautnya.<sup>1</sup> Luas seluruh Karesidenan Bagelen diperkirakan mencapai 2544 palen 2 atau kira-kira 3831 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Sedang penduduknya pada tahun 1930 diperkirakan berjumlah 39.794 cacah atau kira-kira 238.764 jiwa. Jika satu cacah sama dengan enam jiwa.<sup>3</sup> Bagelen diapit oleh tiga deretan pegunungan; pegunungan Kendeng, pegunungan Kelir, dan pegunungan Karangbolong. Deretan pegunungan Kendeng memanjang dari timur ke barat, pada perbatasan utara keresidenan Bagelen memiliki dua deretan cabang menuju ke selatan. Kedua cabang ini adalah pegunungan Kelir pada batas timur Bagelen dan Yogyakarta, dan pegunungan Karangbolong pada batas dengan Karesidenan Banyumas. Dataran rendah Bagelen yang sebagian besar

---

<sup>1</sup> P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistische Wordenboek van Nederlandsch-Indie*. (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1961). Eerste dell, A-J, hlm. 48-49. Lihat Juga ANRI, *Bagelen no 5/10 1930, Verslag der Handelingen van de Komissaris voor der overgenomen voorstenlanden Lawick Pabs*, 1831.

<sup>2</sup> Satu Paal= 15,6.943 m, lihat ENI, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Tweede druk. J.Paulus (ed.). S Gravenhage dan Leiden; Martinus Nijhoff dan N.V./HE. J. Brill. Paal, hlm. 226.

<sup>3</sup> TNI, 1858 "De Toestand van Bagelen in 1830" *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, 20st Jaargang II, hlm. 65-84.

terdiri dari daerah rawa-rawa, seperti Wawar dan Tambak Baya terletak di antara pegunungan Karangbolong dan pegunungan Kelir. Rawa Wawar yang sering disebut sebagai *Groote Rawa* atau rawa besar yang panjangnya sekitar 11 palen dan lebarnya 2-4 palen, terletak di sebelah timur, sedang Rawa Tambak Baya terletak di sebelah barat dan ukurannya lebih kecil dari Rawa Wawar kira-kira 4x4 palen. Di dataran rendah ini tersebar daerah-daerah dengan desa-desa kecil yang menggantungkan diri pada tanah pertanian di rawa-rawa jika musim kering. Sedang di sisi selatan daerah rendah Bagelen terdapat suatu deretan desa panjang tidak terputus-putus kira-kira 4x40 palen menyusuri pantai. Deretan desa ini dimulai dari desa Kadilangu di tepi kali Bagawanta ke Barat sampai tepi kali Cincing Guling, di daerah perbukitan Karangbolong. Deretan desa yang panjang ini disebut daerah Urut Sewu (*Oeroet Sewu*) sebagai tanggul pemisah antara daerah rawa dengan lautan.<sup>4</sup>

Dalam cerita Babad Tanah Jawi, Bagelen diceritakan sebagai wilayah kekuasaan raja dengan pertanian yang sangat maju, disebutkan bahwa Bagelen adalah bagian dari “Negeri Purwo Carito” atau “Negeri Tanah Jawa”, yang diperintah oleh seorang raja yang terkenal sebagai “Raja Petani”,<sup>5</sup> raja kedua dari kerajaan Purwo Carito. Bagelen, yang dalam klasifikasi ekologi menurut Clifford Geertz merupakan wilayah Kejawen,<sup>6</sup> adalah wilayah pertanian dengan areal tanah yang subur dan terkaya di Jawa. Wilayah ini mempunyai sejarah yang cukup unik dan menarik. Perubahan-perubahan yang cukup signifikan menjadikannya suatu wilayah yang selalu menarik untuk dicermati. Intensifnya penetrasi kekuasaan kolonial tampak sekali dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya berkaitan dengan perubahan struktur pembagian wilayah maupun kebijakan ekonominya yang berhubungan dengan perkembangan usaha perkebunan hingga dibukanya bank-bank (*Jawasche Bank*), perusahaan-

---

<sup>4</sup> TNI, Ibid., hlm.68. Lihat juga Laksono, *Tradition in Javanese Social Structure Kingdom and Countryside*, (Yogyakarta: Gama Press, 1990), hlm. 59.

<sup>5</sup> Babat Tanah Jawi, Poeniko Serat Babat Tanah Jawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Tahun 1657. (S-Gravenhage: M, Nijhoff, 1941), hlm. 11-12. A.J. van der Aa, *Nederlandsch Oost-Indie-Beschrijving Der Nederlnadsche-Bezittingen in Oost-Indie*. (Amsterdam: J.F. Schleijer 1851), Derde Deel, hlm. 450.

<sup>6</sup> Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1983), hlm. 102.

perusahaan (*Maschapij*) perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta Asing.

Pada masa pemerintahan VOC, wilayah tersebut merupakan wilayah yang selalu menjadi rebutan para penguasa untuk kepentingan-kepentingan ekonomis, baik antar penguasa tradisional Yogyakarta VS Surakarta, maupun dengan penguasa kolonial, semuanya mempunyai kepentingan yang sama sehingga dalam hal ini Bagelen selalu menjadi pusat perhatian dan tarik menarik antara penguasa-penguasa tersebut, hingga munculnya berbagai kebijakan tentang tanah yang intinya mengatur mengenai penggunaan tanah-tanah di pedesaan. Semenjak masih menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Mataram di Yogyakarta (*Vorstenlanden*) hingga beralihnya kekuasaan kepada pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sebagai wilayah karesidenan di bawah pemerintahan Batavia, perubahan di Bagelen memang merupakan potret dari kasus yang sedemikian menariknya.

Jauh sebelum berdiri sendiri menjadi wilayah karesidenan di bawah pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia, dan juga sebelum terpecahnya Mataram menjadi dua; Kasultanan di Yogyakarta dan Kasunanan di Surakarta, Bagelen merupakan bagian dari wilayah negara agung (*negaragung*) dari kekuasaan Kasultanan Mataram (*Vorstenlanden*), yang berpusat di Yogyakarta, namun semenjak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 antara Nicolas Harting atas nama VOC Belanda di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) di lain pihak,<sup>7</sup> Mataram terbagai dalam dua kekuasaan: Kasultanan di Yogyakarta, dan Kasunanan di Surakarta, sehingga secara geo-politik struktur pembagian daerah kekuasaan pada saat itupun cukup rumit, ada beberapa wilayah distrik di Bagelen yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta, dan ada sebagian wilayah distrik di Bagelen yang menjadi bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta, desa per desa tergantung apakah pemegang lungguh desa yang bersangkutan termasuk pejabat Surakarta atau

---

<sup>7</sup> Arsip Djogja, *Original Contract tuschen het Gouverneur Nicolas Harting van Wegen de Generale Nederlandsche oost-Indische Compagnie en den Sultan Hamengcuboeana* (Hamengku Buwono) (Campemen tot Gantie: 13 Februari 1755), hlm. 4.

Yogyakarta.<sup>8</sup> Semenjak peristiwa Giyanti itulah Bagelen berubah menjadi wilayah *monconegoro* dari kedua kekuasaan tersebut, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Adapun alokasi distrik di Bagelen dalam kekuasaan Mataram antata Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

	<b>MAHOSAN DALEM</b>	<b>LUNGGUH</b>	<b>KERJA GLADAK</b>
KASUNANAN SURAKARTA	1. Tanggung (Cangkrep) 2. Wala (Ambal, Kutoarjo) 3. Panjer (Kebumen) 4. Talaga	1. Merden (Kebumen) 2. Kutowinangun	1. Gesikan (Kutoarjo)
KASULTANAN YOGYAKARTA	1. Bapangan (Jenar, Purworejo) 2. Semawung (Kutoarjo) 3. Ngrawa 4. Watulembu 5. Lengis (Kutoarjo) 6. Selomanik (Wonosobo) 7. Semaiju (Wonosobo)	1. Loano (Purworejo) 2. Blimbing (Karanganyar) 3. Remo/Roma Jatinegoro (Karanganyar)	Selomerto

---

<sup>8</sup> CL. Van Doorn, *Schets van de Ecomische Ontwikkeling der Afdeeling Poerworejo (Residentie Kedoe)* Weltevreden: G. Kolff's Co. 1926, hlm.19. Lihat Laksono, *Op. Cit.* hlm. 72.

<sup>9</sup> Doorn. C.L. *Schets van De Economische Ontwikkeling der Afdeeling Poerworejo (Residentie Kedoe)* Weltevreden, G.Kolff's Co., 1926: 17, dikutip dari PM. Laksono, *Tradition in Javanese Social Sturcture Kingdom and Countryside*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990.



Setelah ditandatangani kontrak politik 27 September 1830,<sup>10</sup> sebagai akibat dari kekalahan Perang Jawa, terjadilah apa yang disebut sebagai "peralihan nagari", terlepasnya daerah-daerah pesisir dari kekuasaan Mataram, dan juga termasuk di dalamnya "*mancanegara*" Bagelen yang semula merupakan lumbung padi bagi Kasultanan Mataram baik Surakarta maupun Yogyakarta yang kemudian dianeksasi oleh pemerintah kolonial. Sejak saat itu mulailah pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjalankan sistem yang baru di daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah dikuasai penuh oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti daerah Bagelen.

Daerah Bagelen yang semula merupakan daerah *mancanegara* dari Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, kemudian dijadikan Daerah Karesidenan. Di sinilah pemerintah Kolonial Hindia Belanda menempatkan seorang residen dan pembantu-pembantunya untuk memegang pemerintahan. Sejak saat itu Bagelen menjadi wilayah Karesidenan sampai tanggal 1 Agustus 1901, karena mulai tanggal tersebut daerah karesidenan Bagelen digabungkan dengan daerah karesidenan Kedu.<sup>11</sup> Sejak 27 September 1830 itulah dimulainya satu periode atau babak baru yang dikenal dengan nama sistem tanam-paksa (*Cultuurstelsel*). Pada waktu itu terjadi kerjasama antara penguasa pribumi dan pemerintah kolonial, akan tetapi pemerintah kolonial belum berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sistem untuk memperoleh keuntungan finansial.<sup>12</sup> Dalam perjanjian 3 November 1830 pemerintah Kolonial masih berjanji akan memberi uang kompensasi sebagai ganti rugi hilangnya penghasilan Sultan.<sup>13</sup>

Ketika berlangsungnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), Bagelen yang merupakan wilayah persengketaan antar elite Jawa dan elite Kolonial, juga merupakan tempat atau ajang penyusunan kekuatan pasukan pengikut Diponegoro. Oleh karena itu trauma perang Diponegoro selalu membayangi Pemerintah Kolonial di wilayah ini.

---

<sup>10</sup> GP. Rouffer, "*Voorstenlanden*" Adatrechtbundels XXXIX, seri D, no. 18. hlm. 19.

<sup>11</sup> B. Paulus, *Encyclopaedia van Nederlands-Indie*. ('S Gravenhage: Martinus Nijhoff-Leiden: N. V v/h. E. J. Brill, 1917), Eerste Deel A -C, hlm. 103.

<sup>12</sup> JH. Houben Vincent, "Economic Policy In the Principalities of Central Java in Nineteenth Century ", in Angus Maddison dan De Prince (ed.) *The Growth in Indonesia 1820-1940*, (Dordrecht, Foris Publication, 1989), hlm. 168-187.

<sup>13</sup> *Ibid*, Kraton & Kumpeni, *Surakarta and Yogyakarta 1830-1870*, (KITLV Press, 1994), hlm. 61-63.

Dengan ditandatanganinya perjanjian 22 Juni tahun 1830 yang kemudian disusul dengan perjanjian 3 November 1830, Bagelen resmi menjadi wilayah Residensi Belanda, hanya beberapa bulan setelah selesainya Perang Jawa. Wilayah Residensi Bagelen pada saat itu terdiri atas *Afdeeling* Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo, sedangkan ketika menjadi bagian dari wilayah Kasultanan Mataram hanya meliputi Purworejo dan Kebumen. Wonosobo yang dulu terdiri dari Ledok dan Gowong, merupakan bagian wilayah yang terpisah dari Bagelen.<sup>14</sup> Setelah berlalunya Perang Jawa dan dikuasainya Bagelen oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda, mulailah dirintis hubungan yang lebih luas dengan daerah-daerah luar.

Hubungan yang mula-mula terjadi antara karesidenan Bagelen dan sekitarnya adalah karena kepentingan ekonomi, namun kemudian hubungan tersebut semakin meluas ke arah kepentingan-kepentingan sosial politik, perdagangan, dan juga keagamaan yang terus berlangsung dan kemudian menimbulkan berbagai macam kepentingan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Perkembangan yang terjadi di antaranya dalam bidang pembagian wilayah dan perkembangan wilayah dari pedesaan menjadi perkotaan antara tahun 1840-1845.

Wilayah Bagelen ini pada masa tanam paksa merupakan daerah pusat perkebunan nila (*indigo*).<sup>15</sup> Meskipun pada masa itu merupakan penghasil nila (*indigo*) terbanyak di Jawa, namun di akhir masa tanam paksa perkebunan nila tersebut telah dihapus.

### C. STRUKTUR MASYARAKAT BAGELEN

Berbicara tentang struktur masyarakat Bagelen tentu tidak bisa dilepaskan dari berbicara tentang masyarakat Jawa dan struktur sosial pada umumnya yang sudah banyak dibahas oleh para peneliti, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di antara mereka adalah Burger,<sup>16</sup> Wertheim,<sup>17</sup> Koentjaraningrat,<sup>18</sup> dan juga Van den Berg yang

---

<sup>14</sup> P.M. Laksono, *Op.Cit.* (1990), hlm. 59.

<sup>15</sup> Didien Ngadinem, "Perkembangan Daerah Karesidenan Bagelen pada Pertengahan Abad XIX: sebuah Studi Sejarah Ekonomi", (Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1993), hlm. 108-112.

<sup>16</sup> D.H. Burger, "Structuurveranderingen in de Javaansche Samenleving", *Indonesie*, III (1949-1950), hlm. 101-123.

<sup>17</sup> Wertheim, W.F.. *Indonesian Society in Transition*, terj. (Te Hague: 1959).

membicarakan sistem pangkat pada masyarakat tradisional di Jawa,<sup>19</sup> Dari hasil penelitian mereka dapat diperoleh pemahaman tentang stratifikasi sosial secara deskriptif, sistem pangkat dalam masyarakat tradisional Jawa, dan juga tulisan Geertz yang pernah membahas tentang perkembangan elite bangsa Jawa.<sup>20</sup>

Berbicara tentang masyarakat Jawa tradisional pada masa kolonial akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan stratifikasi sosial (lapisan masyarakat semacam kasta), diskriminasi ras, perbedaan status dan prestise. Selanjutnya akan dihadapkan pula pada persoalan-persoalan perubahan, mobilitas sosial dan lain-lainnya, sebagai akibat dari perubahan kebijakan, kesadaran politik, maupun pengaruh arus modernisasi, yang masih canggung atau kaku, sebagaimana terbentuknya birokrasi modern. Berkembangnya birokrasi modern pada umumnya mengubah tatanan birokrasi tradisional kerajaan, yang pada gilirannya nanti juga akan mengubah atau menggeser hierarki sosial masyarakat sebelumnya.

Mengenai masyarakat Bagelen, tampaknya harus dilihat hal-hal yang bersifat umum sebagaimana masyarakat Jawa lainnya, namun dan juga hal-hal yang bersifat khusus secara lokal. Hal umum yang terpenting dan layak digarisbawahi adalah, bahwa sistem sewa tanah ataupun tanam paksa seperti juga yang berlaku di masyarakat Jawa lainnya yang dalam hal ini telah melahirkan pelestarian bentuk-bentuk kerja sama dalam sistem *patrone-client* yang memang merupakan bentuk warisan dari sistem lama, yakni sistem perbudakan yang sudah ada sejak zaman klasik, meskipun dalam hal ini perbudakan di Indonesia harus dibedakan dari kasus perbudakan di Afrika yang memang sudah ada sebelum zaman pencerahan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> R.M. Koentjaraningrat, "The Javanese of South Central Java" di dalam G.P. Murdoch (ed.) (New York: 1960), hlm 88-115.

<sup>19</sup> Van den Berg, L.W.C. *De Indlandsche Titels end Rangen op Java en Madura*, (Den Haag: 1902)

<sup>20</sup> Geertz, Clifford, *The Social Context of Economic Change: An Indonesian Case Study*, (Cambridge, 1956), hlm. 84-94. Lihat Sartono Kartodirdjo, "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial", (Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra UGM) dalam *Lembaran Sedjarah* No. 4, 1969. hlm. 41

<sup>21</sup> Perbudakan yang ada di Indonesia bagaimanapun juga merupakan bentuk perbudakan yang lebih manusiawi karena sudah melewati masa pencerahan, karena pada abad ke-19, ide-ide pencerahan dari Eropa mulai mempengaruhi wilayah Timur. Pengeriman paksa yang diminta oleh apara perantara bupati semakin banyak dikritik. Untuk hal ini lihat Wertheim, *Masyarakat Indonesia*, hlm. 188-191.

Sistem *patrone-client* tidak hanya melibatkan kaum pengusaha asing saja, tetapi juga kaum bangsawan pribumi ataupun pejabat pemerintah yang juga berlaku sebagai tuan tanah. Selain itu sebagian tuan tanah adalah juga para pemuka agama yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi pada masa itu. Para pekerja (buruh) perkebunan itu tunduk dan sangat banyak tergantung kepada para *patrone* mereka masing-masing, baik secara politis maupun ekonomis. Jadi, dalam struktur politik maupun sosial ekonomi, pemerintah kolonial ada dalam lapisan pertama sebagai elite politik, sedangkan para penguasa perkebunan, tuan tanah atau pemilik modal berada dalam lapisan kedua, termasuk di dalamnya bisa juga para kyai, atau pemuka spiritual yang memiliki lahan tanah yang cukup luas, sehingga dapat disebut sebagai tuan tanah. Adapun para petani perkebunan posisinya paling jelas ada di strata yang paling bawah dari tiga strata sosial masyarakat perkebunan yang bertingkat tersebut.

Pembagian masyarakat secara struktur sosial keagamaan di Bagelen pasca Perang Jawa tidak begitu menggambarkan perubahan yang mencolok. Secara sosial keagamaan sedikit berbeda dengan pembagian struktur secara politik maupun sosial ekonomi yang begitu cepat berubah, hal ini juga tidak terlepas dari struktur secara sosial budaya yang ada. Masyarakat yang secara sosial menempati strata sosial ekonomi lebih tinggi sekaligus biasanya menggambarkan status atau strata keagamaan yang lebih tinggi dari golongan yang lainnya, namun dalam masyarakat petani Bagelen ini nampaknya status sosial secara keagamaan tidak mengalami perubahan. Status pemimpin spiritual (Kyai) sebagai pemimpin masyarakat secara tradisional tetap menempati posisi yang sangat istimewa, meskipun hal ini mungkin juga tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial ekonomis. Secara keagamaan tokoh spiritual adalah elite dalam masyarakat, ini dapat dilihat dari ketundukan mereka terhadap orang-orang yang berilmu tinggi (kejawan), yang mereka sebut sebagai Kyai, sedangkan para birokrat, yang terdiri dari pamong praja mulai tingkat kabupaten hingga pegawai *rendahan* tidak menempati strata yang lebih tinggi dari masyarakat petani secara umum. Secara sosial keagamaan baik para birokrat maupun para petani sebagai penduduk biasa berada dalam satu strata yang sama.

Demikian pula dalam hal kepemimpinan, dalam masyarakat petani Bagelen dikenal adanya beberapa model kepemimpinan yang

berlaku. Secara struktur keagamaan mereka memiliki kepemimpinan tradisional yang khas. Mereka mempunyai pemimpin yang disebut sebagai Kyai, seseorang yang dengan berilmu tinggi yang dapat membimbing mereka bukan hanya dalam masalah keagamaan, namun juga sebagai seorang guru yang serba tahu tentang segala hal, baik dalam hal hubungan sosial (*muamalah*), maupun hubungan peribadatan kepada Tuhan (*ibadah*) hingga pengetahuan tentang ilmu-ilmu gaib. Tipe kepemimpinan semacam ini biasanya disebut sebagai pemimpin yang kharismatik. Dalam pengertian ideal, kepemimpinan kharismatik adalah kepemimpinan tradisional yang tuntutan keabsahannya didasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi yang amat kuno.<sup>22</sup>

Di samping kepemimpinan yang kharismatik, memang masyarakat petani di Bagelen juga mengenal kepemimpinan lain yang berbeda. Dalam struktur pemerintahan mereka dihadapkan kepada model kepemimpinan modern, yakni model kepemimpinan birokrasi kolonial yang sangat berbeda dengan kepemimpinan tradisional. Kalaupun mereka patuh dan tunduk kepada para birokrat sebagai pemimpin pemerintahan, adalah semata-mata karena mereka sedang berkuasa bukan karena percaya bahwa mereka adalah pemimpin yang harus diikuti berdasarkan keistimewaan-keistimewaan supranatural, sebagaimana yang dimiliki para kyai sebagai pemimpin tradisional. Predikat Kyai bagi masyarakat Jawa adalah sebuah supremasi yang sangat tinggi. Kyai adalah sosok yang sangat tinggi prestisenya, di samping karena ilmunya yang dianggap sangat tinggi adalah karena kemutlakan kepemimpinan yang diperoleh secara gaib dari kekuatan yang maha tinggi dan maha dahsyat.

Kepatuhan mereka terhadap seseorang yang disebut Kyai adalah karena kharisma yang dimilikinya, terlebih lagi jika seseorang tersebut menjadi patrone yang menjamin keselamatan hidupnya tidak hanya dari segi spiritual, tetapi juga secara ekonomis, karena boleh jadi sebagian dari para kyai adalah Tuan tanah, yang menjamin kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Jadi, secara keseluruhan boleh dikatakan bahwa model kepemimpinan yang ada dalam masyarakat perkebunan di Bagelen adalah model kepemimpinan yang sifatnya

---

<sup>22</sup> Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, (Ed.), cet. Ketiga, (Jakarta: LP3ES, terj. Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. 166, lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 42.

multi, tidak tunggal, tetapi kepemimpinan yang bermacam-macam karena ketundukan mereka bukan hanya kepada satu pemimpin atau pelindung, tetapi kepada pelindung secara politis, ekonomis, dan juga keagamaan.

Hubungan *patrone-client* barangkali memang merupakan satu bentuk yang paling lestari dan dominan sejak zaman pra kolonial hingga zaman diterapkannya sistem tanam paksa maupun sistem ekonomi liberal di lokasi-lokasi perkebunan. Masyarakat petani subsistem yang mempunyai corak kehidupan spiritualitas yang kental dan khas Jawa, biasanya memiliki bentuk kepemimpinan ganda. Tidak serta-merta petani Jawa seperti mereka dapat tunduk kepada suatu bentuk kepemimpinan birokratis. Di samping mereka terpaksa tunduk kepada bentuk kepemimpinan birokratis, yang lebih kuat adalah ketundukan mereka kepada pemimpin yang kharismatik, karena pemimpin spiritual yang kharismatik pada waktu itu selalu merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan yang dianggap *linuwih* (memiliki kelebihan-kelebihan), ketimbang pemimpin yang hanya merupakan jabatan resmi dari pemerintah; yang mempunyai kekuasaan hanya karena jabatannya, bukan kharismanya. Kepemimpinan semacam ini biasanya tidak langgeng dalam masyarakat tradisional, seperti halnya dalam masyarakat petani di Bagelen, begitu pemimpin secara birokrasi tidak berkuasa lagi mereka tidak merasa perlu menuruti keinginannya ataupun mematuhi perintahnya.

#### **D. PERUBAHAN STRUKTUR BIROKRASI PEMERINTAHAN**

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian atau kontrak politik 27 September 1830, antara pemerintah Kasultanan Mataram dengan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang berisi tentang pembagian wilayah administratif Jawa, dalam hal ini Bagelen termasuk wilayah yang terimbas oleh arus perubahan struktur tersebut sebagai daerah yang dalam surat perjanjian termasuk wilayah yang diserahkan kepada pemerintah Kolonial Hindia Belanda, dengan sendirinya Bagelen memerlukan adaptasi-adaptasi struktur maupun kultur. Perubahan struktur birokrasi pemerintah dapat terlihat di Bagelen setelah selesainya Perang Jawa dengan adanya pembagian wilayah secara administratif ini. Sebagaimana sudah disebut di depan, bahwa

jauh sebelum munculnya Perjanjian Giyanti kemudian meletusnya Perang Jawa, struktur birokrasi di Bagelen pada mulanya mengikuti struktur birokrasi pemerintahan Kasultanan Mataram (*Vorstenlanden*). Ketika itu wilayah Bagelen masih merupakan bagian dari wilayah negara agung (*negaragung*), yakni lapisan kedua dalam lingkaran konsentris Kasultanan Mataram, sebagaimana Siti Ageng atau Bumi Gede, Kedu, dan Pajang. Lapisan pertama dari sistem birokrasi Kasultanan Mataram adalah *Kutanegara* atau *Kutagara*, dengan Istana atau kerajaan sebagai pusat pemerintahan konsentris. Lapisan kedua adalah wilayah Negara Agung (*Negaragung*), termasuk di dalamnya adalah Bagelen. Lapisan Ketiga setelah *negaragung* adalah wilayah Mancanegara (*mancanegara*).

Bagelen sendiri sebagai wilayah *negaragung* dibagi menjadi daerah Sewu, yang terletak di antara sungai Bogowonto dan sungai Donan di Cilacap, dan daerah Numbak Anyar yang terletak di antara sungai Bogowonto dan sungai Progo. Bagelen, sebagai wilayah *negaragung* masih termasuk wilayah yang dekat dengan pusat kerajaan, tiap-tiap daerah bagian dikepalai oleh seorang Wedana Luar (*Wedana Jawi*) sesuai dengan nama daerah bagian masing-masing. Dalam hal ini Bagelen meliputi Wedana Sewu dan Wedana Numbak Anyar.<sup>23</sup>

Sebagai wilayah *negaragung* yang mempunyai hubungan integral dengan pemerintah pusat sebagai sentral Kerajaan Mataram, kepada wilayah tersebut pemerintah pusat berusaha menguasai secara ketat pejabat-pejabat daerah dengan mengharuskan pejabat-pejabat *negaragung* untuk bertempat tinggal di ibukota kerajaan (*Kutagara*). Hal demikian juga berlaku bagi beberapa bupati *mancanegara* dan pesisiran. Semua itu memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah pusat, yakni Raja (Sultan). Hubungan konsentris dan integrasi politik pemerintahan daerah-pusat diikat dalam bentuk kewajiban membayar upeti dari penguasa daerah berupa uang dan barang-barang yang diambil dari para pedagang, sedangkan untuk *negaragung* diwujudkan dalam bentuk hubungan antara raja dan pejabat di *negaragung*. Untuk *negaragung* Bagelen, Adikarto adalah penghubung antar Kasultanan Mataram dengan *negaragung* Bagelen, karena lokasinya yang sangat strategis dan juga dekat sekali dengan Purworejo, Adikarto merupakan daerah *Paku Alam* dengan bupatinya di Wates.

---

<sup>23</sup> J.L.A. Brandes, *Register op de Proza Omzetting van De Babad Tanah Djawi* (Uitgave van 1794), (VBC, 1900), hlm.156-159.

Jika ditengok kembali ke masa VOC, yakni semenjak datangnya pengaruh VOC pada awal abad-18, kita akan melihat proses mengenai sistem pembagian wilayah yang selalu mengalami perubahan-perubahan. Setelah pemerintahan pengganti Sultan Agung, mulai tampak terjadi kemunduran-kemunduran, berangsur-angsur kekuasaan Mataram mulai menyempit akibat aneksasi VOC, sebagai imbalan intervensi perang-perang internal. Kemunduran ini terus berlangsung dengan mulai pecahnya Mataram menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta hingga terpecahnya Yogyakarta ke dalam kekuasaan Kasultanan dan Pakualam. Bagelen pun, sebagai wilayah penting dalam hal ini juga ikut mengalami perubahan-perubahan, dari *negaragung* menjadi *mancanegara*, kemudian dari wilayah *mancanegara* akhirnya menjadi Karesidenan Bagelen.

Ketika pemerintah Inggris merebut Jawa dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1812, Yogyakarta dan Surakarta ingin memulihkan kekuasaannya kembali seperti semula, meskipun kenyataannya wilayah kedua negara tersebut semakin berkurang, dan ketika pulau Jawa kembali ke tangan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, raja-raja Jawa berharap dapat mengembalikan kekuasaan, tetapi gagal karena ternyata pemerintah Hindia Belanda memperbaharui semua keputusan pemerintah Inggris, sehingga mengecewakan Istana Yogyakarta dan Surakarta yang memunculkan benih permusuhan menentang Belanda hingga meletuslah Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830). Perang tersebut mengakibatkan menyempitnya kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta dan semakin bergantungnya kedua negara tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu pula Bagelen resmi menjadi wilayah karesidenan di bawah kekuasaan Hindia Belanda dengan kontrak-kontrak politik yang telah disetujui oleh kedua belah pihak antara penguasa pribumi dengan pemerintah kolonial.

Perlu dicatat bahwa sebelum penyerahan Bagelen, pada masa pemerintahan Inggris terjadi penyerahan Kedu, Pacitan, Grobogan, Blora, Jipang, dan Wirasaba (1812), dan setelah selesai Perang Diponegoro (1831), diserahkan juga Banyumas, Bagelen, Madiun, dan Kediri. Dengan demikian hampir seluruh wilayah daerah Mataram yang ditaklukkan Sultan Agung menjadi wilayah pemerintah Kolonial Hindia Belanda, termasuk Bagelen. Perubahan struktur birokrasi pemerintahan daerah yang dimulai oleh Deandels dan Raffles itu



dicegah oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkuasa lagi di Indonesia.<sup>24</sup> Se jauh itu Bagelen masih berstatus daerah yang disebut “Wilayah” (dalam bahasa Belanda “Provinsi”) yang dibagi menjadi lima kabupaten: Ketanggung (ketangong), Semawung (Semawong), Kuto-Winangun (Koetowinangon), Remo dan Urut-Sewu (Oeroet-Sewu); 23 distrik, dan pusat pemerintahan di Brengkelan (Brinkeleen) sebagai ibu kota. Baru setelah tanggal 23 Agustus 1832, sejak Adipati Tjokronegoro I yang diangkat oleh Van den Bosch menjadi Bupati I di Brengkelan, daerah Bagelen mulai dibangun dan ditingkatkan, dan kemudian wilayah (provinsi) Bagelen dijadikan Karesidenan. Ibu kota yang semula di Brengkelan dipindahkan di Kedung-Kebo, yang kemudian disebut Purworejo. Organisasi pemerintahan ada di bawah kekuasaan dua daerah karesidenan. Khusus mengenai urusan keuangan berada di bawah kekuasaan Pemerintah Karesidenan Kedu, sedangkan untuk urusan lainnya ada di bawah kekuasaan karesidenan Banyumas.<sup>25</sup>

Daerah yang semula dibagi lima kabupaten, kemudian dibagi menjadi empat *afdeeling* yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten, 23 (dua puluh tiga) distrik, tiap-tiap distrik dibagi menjadi banyak desa dan kampung (daerah-daerah administratif yang terkecil).<sup>26</sup> *Afdeeling* pertama meliputi dua kota kabupaten yang dijadikan pusat pemerintahan, yaitu Purworejo sebagai kota karesidenan dan Kutoarjo sebagai kota kabupaten. Daerah sekitar Purworejo disebut daerah kabupaten Purworejo dengan ibukota Purworejo, dan daerah sekitar Kutoarjo disebut daerah kabupaten Kutoarjo dengan ibukota Kutoarjo. Yang termasuk *Afdeeling* Purworejo, masa sebelumnya adalah kabupaten Ketanggung dan Semawung. *Afdeeling* ke dua adalah *Afdeeling* Kebumen dan Karanganyar. Kabupaten Kebumen sebelumnya dinamakan kabupaten Kutowinangun, dan Kabupaten

---

<sup>24</sup> ANRI Jakarta, *Bagelen 1831*, 5/10, *Verslag der Handelingen van de Kommissaris Voor ou Overgenomen Vorstenlanden*, Lawick van Pabst, 1831.

<sup>25</sup> Arsip Djokja No. 11/3. *Rapport van den Resident van Kedoe aan Heeren Komissarissen ter Regeling der Zaken In den Vorstenlanden*, *Heudende Verslag van zijn Verplichtingen in Bagelen* (Kedoe: De Resident. De dato 18 September 1830).

<sup>26</sup> Didien Ngedinem, dalam Skripsinya menjelaskan bahwa desa adalah bagian daerah terkecil yang terletak diluar kota pusat-pusat pemerintahan (di daerah-daerah pedesaan). Dalam kenyataan desa masih dibagi-bagi lagi menjadi pedukuhan-pedukuhan yang telah ada jauh sebelum abad XVIII. Kampung adalah daerah terkecil yang ada dalam lingkungan daerah perkotaan ya menjadi pusat pemerintahan.

Karanganyar sebelumnya dinamakan Kabupaten Remo.<sup>27</sup> *Afdeeling* ke tiga adalah *Afdeeling* Ambal, daerah pinggiran pantai selatan memanjang dari timur ke barat yang dulu merupakan bagian selatan dari daerah-daerah Kabupaten Ketanggung, Semawung, Kutowinangun, dan Remo. *Afdeeling* ke empat adalah *Afdeeling* Ledok, sebelumnya dinamakan Urut Sewu, Ibukota Tlogo, yang kemudian menjadi Wonosobo.

Daerah *Afdeeling* Ambal dan Ledok masing-masing dipegang oleh seorang asisten Residen. Pemerintah tertinggi daerah Karesidenan Bagelen dipegang oleh seorang residen. Residen yang pertama adalah Ruikenar, yang berkedudukan di Purworejo. Di samping jabatan residen ada asisten residen dan bupati. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada waktu itu mengangkat orang-orang Belanda dan juga orang-orang pribumi untuk menjadi pejabat tertentu dan ditempatkan di daerah Karesidenan Bagelen. Jabatan-jabatan seperti sekretaris karesidenan, kepala kantor, antara lain Kantor pelelangan, Yayasan Yatim Piatu, dan Balai Peninggalan Harta Benda dari Kantor Cabang di Semarang; juga sebagai notaris, penarik pajak, juru sita, diberikan kepada orang-orang Belanda, sedangkan jabatan-jabatan seperti penghulu dan hakim diberikan kepada pribumi.

Pada tahun 1855 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *Reglement op het Bieleid der Regering van Nederlandsch-Indie* (RR.) S. No. 2 tahun 1855 yang dapat dianggap sebagai UUD Hindia Belanda. Dengan RR tahun 1855 ini pemerintah Kolonial Hindia Belanda berusaha mengatur birokrasi pemerintahan daerah secara rasional, yaitu menyusun suatu hirarki pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah dengan asas dekonsentrasi. Wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi wilayah-wilayah administratif; *Gewesten*, *Afdelingen*, *Onderafdelingen*, *district*, dan *Onderdistrict*. Pejabatnya terdiri dari Gubernur, Residen yang dibantu oleh *asisten residen*, dan *kontrolir*. Di Jawa mereka membawahi Bupati di setiap kabupaten, Bupati membawahi Wedana, wedana membawahi camat, dan camat membawahi Kepala Desa. Pembagian wilayah yang semula empat *Afdeeling* berubah menjadi lima *Afdeeling*, enam kabupaten, dua puluh tiga distrik, dan tiga ribu delapan puluh delapan (3.088) desa dan

---

<sup>27</sup> Dalam Babad Giyanti daerah Remo dinamakan Roma, R Ng. Jasadipura I, *Babad Giyanti, Pratelaan Namaning Tiyang lan Panggenan* (Batavia: Bale Poestaka, 1939), Serie No.1257.U, hlm. 80.

kampung. Kabupaten Kutoarjo yang semula masuk wilayah *Afdeeling* Purworejo kemudian dijadikan *Afdeeling* baru.

Pada tahun 1865 sampai dengan 1868 pembagian daerah administratif masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, lima *Afdeeling*, enam kabupaten dan dua puluh tiga (23) distrik, sedangkan jumlah desa dan kampung mengalami penyusutan, yakni sebanyak empat ratus enam puluh tiga (463) desa dan kampung.<sup>28</sup> *Afdeeling* Purworejo, Kutoarjo, Ambal dan Ledok masing-masing dinamakan daerah dan kabupaten, sedangkan *Afdeeling* Kebumen dibagi menjadi Kabupaten Kebumen dan Karanganyar.<sup>29</sup> Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1869-1872 Karesidenan Bagelen dibagi menjadi enam *Afdeeling*, enam kabupaten, 23 distrik dan di beberapa desa dan kampung mengalami perubahan.<sup>30</sup> Sebagaimana yang uraikan oleh Didien Ng. dari halaman 26-41 dalam skripsinya bahwa perubahan pembagian seluruh daerah Karesidenan Bagelen dari tahun 1831-1872, secara singkatnya adalah sebagai berikut.

### 1. Periode 1831-1854

Perubahan terjadi karena masa peralihan dari daerah monconegoro Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, kemudian menjadi Karesidenan di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Politik Hindia Belanda dengan "Sistem Tanam-Paksa" memandang perlu adanya perubahan-perubahan pembagian daerah yang disesuaikan dengan para pejabat yang akan ditugaskan. Berhasil atau tidaknya sistem tanam paksa berhubungan erat dengan kemampuan para pejabat pelaksana di daerah, berarti berkaitan erat dengan pelaksanaan sistem tanam paksa. Periode tanam paksa ini merupakan periode pembangunan yang menyangkut bidang-bidang pengairan, pertanian, dan perhubungan, seperti pembuatan jembatan dan jalan yang merupakan sarana penting untuk melaksanakan sistem tanam paksa.

---

<sup>28</sup>*Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1865*. (Batavia: Ter Land-Drukkerij, 1865), hlm. 221-222, lihat Didien Ngadinem *op. cit.* tabel A dan B., hlm 24-26.

<sup>29</sup>Didien Ng. *op.cit.*, Lihat Tabel B, hlm. 25.

<sup>30</sup>*Ibid.*, lihat tabel C, hlm. 27.

## 2. Periode 1855-1863

Dalam periode ini, perubahan-perubahan pembagian daerah terjadi antar lain karena; pertambahan penduduk yang cepat. Karena penduduk merupakan sumber daya yang potensial maka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tanam paksa. Oleh karena itu diperlukan tambahan pejabat baru untuk membimbing dan mengawasi cara kerja penduduk pribumi dalam pelaksanaan tanam paksa.

## 3. Periode 1869-1873

Terjadi perubahan politik pemerintah Hindia Belanda dari sistem tanam paksa ke masa ekonomi liberal. Penghapusan sistem tanam paksa di Karesidenan Bagelen sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1865, ketika perusahaan nila atau indigo pemerintah muai dialihkan kepada perusahaan swasta, tetapi baru pada tahun 1869 perlu penambahan pejabat-pejabat di daerah-daerah *afdeeling* untuk menangani berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan penghapusan sistem tanam paksa. Mulai tahun 1873 pembagian daerah Karesidenan Bagelen kembali menjadi seperti tahun 1855, yaitu dibagi menjadi lima *afdeeling* dan lima kabupaten. Tiap-tiap kabupaten dibagi menjadi distrik-distrik. Seluruh daerah kabupaten dalam wilayah Karesidenan Bagelen dibagi menjadi 23 distrik. Pembagian dalam distrik ini tidak pernah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang sering terjadi yang agak menonjol hanya pada daerah administratif terkecil, yaitu desa dan kampung.

Perlu diketahui bahwa selama periode 1840-1870 di daerah Karesidenan Bagelen belum ada pembagian daerah yang disebut "*onderdistrict*" baru pada akhir abad ke XIX sampai XX mulai dibentuk daerah *onderdistrict*.<sup>31</sup> Pada tahun 1873 seluruh daerah Karesidenan Bagelen yang dibagi menjadi lima kabupaten hampir seluruhnya telah berubah, kecuali Kabupaten Ledok yang tidak ada perubahan.<sup>32</sup> Perubahan tersebut ialah: Kabupaten Ambal sejak tahun 1873 dibagi menjadi tiga bagian daerah (Ambal Timur, Ambal Tengah, dan Ambal Barat) dan masing-masing digabungkan dengan Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Karanganyar, sehingga mulai saat itu Kabupaten Ambal

---

<sup>31</sup> *Regering Almanak van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1890*. (Batavia: Ter Land Drukkerij, 1890), hlm. 84.

<sup>32</sup> Didien, Ng. *op. cit.*, Lihat Tabel D. hlm 30.

tidak ada lagi. Pembagian daerah pada periode tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hubungan dan pengawasan dari pusat ke daerah-daerah kabupaten, juga dimaksudkan untuk mengurangi pejabat pemerintah yang bertugas selama berlakunya sistem paksa di Bagelen (1830-1870). Pejabat-pejabat tersebut dipindahkan ke luar Jawa untuk menangani perusahaan tanaman kopi pemerintah, antara lain di Gorontalo yang dimulai tahun 1870, pada tahun yang sama juga dimulai di Bengkulu. Demikian juga karena pada tahun 1870 pihak pemerintah Belanda di Nederland mulai mengalihkan usahanya ke bidang perindustrian dan pendirian berbagai macam bank. Untuk menanamkan modal, maka hal ini akan mempengaruhi daerah jajahannya di pulau Jawa; untuk memulai mendirikan berbagai macam bank pemerintah.<sup>33</sup>

Mengenai daerah Kabupaten Purworejo, ia terletak di ujung sebelah timur, luas daerahnya 263 paal persegi,<sup>34</sup> ( kurang lebih ada 597, 285887 km 2), sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dan bertanah vulkanis yang subur. Sebelum Perang Diponegoro berlangsung, kota Purworejo belum ada, dan selama perang berlangsung di daerah Bagelen antara tahun 1828-1829 Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya memilih daerah Barat sungai Bogowonto yang dikenal dengan sebutan Gedong-Kebo sebagai daerah pertahanan. Setelah perang berakhir daerah sekitar Gedong-Kebo dikenal dengan nama Purworejo yang kemudian dikembangkan menjadi kota. Mulai saat itulah Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perubahan dan pembaharuan secara administratif. Perkembangan terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintahan dibenahi dengan menggunakan prinsip-prinsip modern. Salah satu tindakan yang jelas ialah pemerintah Belanda mengatur pemerintahan Indonesia yang disebutnya sebagai Hindia Belanda dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat rasional yang berdasarkan pada *Grondwet* Belanda tahun 1887. Sebelumnya, *Grondwet*

---

<sup>33</sup> Sartono Kartodirdjo, *Lembaran Sejarah* No. 8, "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada abad 19 dan 20", Cet. Kedua, (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Juni, 1972), hlm. 10-12.

<sup>34</sup> *Algemeen Verslag der Residensi Bagelen over het Jaar 1860*. (Purworejo: De Residen van Bagelen den 12 februari), *Eerste Afdeling-Algemeen Bestuur*, B., Bevolking, Bagelen No. 4/1.

ini semenjak tahun 1814 telah mengalami perubahan pada tahun-tahun: 1815, 1840, 1848, 1884, 1917, 1922, dan tahun 1939.

Pasal 1 *Grondwet* 1887 memasukkan Hindia Belanda sebagai wilayah Kerajaan Belanda, tetapi baru pada tahun 1922 *Grondwet* Belanda itu mengatur kedudukan hukum ketatanegaraan Hindia Belanda secara tegas berdasarkan atas usul yang disampaikan oleh satu komisi yang dibentuk oleh Gubernur Jendral Van Limburg Stirum. Dalam kaitannya dengan Bagelen, sebagai bagian wilayah administratif Hindia Belanda, adalah satu wilayah residensi yang dipimpin oleh seorang *Residen* dibantu oleh seorang *asisten residen*, yang membawahi beberapa *afdelingen* dan *onderafdelingen* dan beberapa *controleer* di beberapa distrik.

#### **E. MASUKNYA SISTEM EKONOMI MODEREN DAN MUNCULNYA PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA**

Semenjak Bagelen masih menjadi bagian dari wilayah monconegoro dari Kasultanan Mataram hingga menjadi Karesidenan, Perekonomian dan penggunaan tanah sudah mengalami empat kali pergantian sistem, yakni Sistem upeti, Sistem sewa tanah, Sistem tanam paksa, dan kemudian disusul oleh Sistem liberal. Sistem Upeti terjadi ketika Bagelen masih menjadi bagian dari wilayah Kasultanan Mataram (*vorstenlanden*), kemudian sistem sewa tanah terjadi ketika Bagelen berada di bawah kekuasaan Raffles atau Pemerintah Kolonial Inggris, sedangkan sistem tanam paksa terjadi setelah selesainya Perang Jawa, atau pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Van den Bosch.

Persoalan pergantian sistem ini pada dasarnya berkaitan erat sekali dengan ide-ide liberalisme yang sebenarnya sudah pernah dicoba diperkenalkan oleh Raffles, yang pada akhirnya diterapkan lagi pada masa ekonomi liberal, yakni setelah dikeluarkannya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada tahun 1870. Ketika di Bagelen ataupun wilayah monconegoro yang lain masih berada di dalam kekuasaan Kasultanan Mataram (*vorstenlanden*), atau sebelum masuknya kekuasaan kolonial Inggris, dalam urusan tata guna tanah hanya berlaku sistem upeti. Daerah Negaragung ataupun di bawahnya cukup menyerahkan hasil buminya sekian persen kepada pemerintah pusat (kerajaan) sebagai tanda bulubekti kepada raja atau sultan.

Ketika dimulainya sistem sewa tanah yang dicoba diterapkan oleh Raffles, saat itu Bagelen masih menjadi bagian dari wilayah monconegoro, sebenarnya saat itu merupakan masa ketika ide-ide liberal sudah mulai nampak digulirkan oleh Raffles. Dalam upayanya untuk menegakkan suatu kebijakan kolonial yang baru, Raffles mulai mengemukakan ide-ide liberal dan menentang sistem VOC yang dinilainya tidak menguntungkan dan cenderung menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, dia menggantinya dengan sistem baru, di mana rakyat dibebaskan menanam tanaman sesuai dengan jenis tanaman dagangan yang dikehendaki yang dapat diekspor ke luar negeri. Dalam hal ini pemerintah hanya berkewajiban untuk menciptakan segala pasaran yang diperlukan guna merangsang para petani untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang dinilai paling menguntungkan. Sistem ini juga berlaku di beberapa tempat di pulau Jawa, kecuali Batavia dan Parahiyangan. Di Jawa Tengah nampaknya sistem ini lebih merata termasuk di Bagelen. Sistem sewa tanah ini mengandung tiga aspek: yakni pertama; penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar-dasar modern atau sistem Barat, kedua; pelaksanaan pemungutan sewa, ketiga; penanaman tanaman dagangan untuk diekspor.

Meskipun kekuasaan Inggris ini hanya berlangsung lima tahun (1811-1816) namun masa tersebut ternyata sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijakan pemerintah kolonial pada masa selanjutnya. Pelaksanaan sistem sewa tanah yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintah Inggris di bawah Raffles, ternyata kemudian diterapkan juga oleh pemerintah Belanda sampai tahun 1830. Pelaksanaan sistem sewa tanah yang dikenal dengan nama *Landlijk Stelsel* ini mengandung konsekuensi-konsekuensi yang jauh sekali atas hubungan pemerintah kolonial di satu pihak dan rakyat Indonesia di lain pihak, sebab sistem tersebut berkembang menjadi cenderung revolusioner, dengan hilangnya unsur paksaan dan digantikannya dengan sistem kontrak yang diadakan secara sukarela. Perubahan sistem ekonomi ini selanjutnya lebih merupakan perubahan sosial-budaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat tradisional menjadi sebuah ikatan kontrak. Dan di situlah mulai ada perubahan dalam kehidupan sosial budaya dalam masyarakat.

Dalam kenyataannya sistem ini dinilai tidak berhasil untuk menghasilkan tanaman ekspor, di samping juga dalam usaha untuk

mengesampingkan peran Bupati dan Kepala-kepala desa untuk berhubungan langsung dengan petani, karena ternyata struktur feodal tetap berlaku di masyarakat tradisional Jawa. Gengsi sosial tetap dimiliki oleh para Bupati dan Kepala Desa dalam ikatan-ikatan tradisional, meskipun sebenarnya peran mereka telah digantikan oleh pejabat-pejabat Eropa, mereka tetap saja melakukan pemungutan pajak atas petani secara langsung. Kebijakan Raffles yang hanya berlangsung lima tahun ini diteruskan oleh pemerintahan baru, di antaranya oleh Komisaris Jenderal Elout (1826-18190), dan kemudian oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826), dan Komisaris Jenderal Du Bus de Gissingnies (1826-1830).<sup>35</sup> Sistem Sewa Tanah baru dihapuskan dengan datangnya seorang Gubernur Jenderal baru, yakni Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 yang kemudian menghidupkan kembali sistem paksaan dalam penanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras lagi, yang disebut dengan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*).

Seiring dengan berlalunya Perang Jawa (1825-1830), dan berpindahannya status Bagelen dari bagian wilayah monconegoro menjadi wilayah Karesidenan, sistem tanam paksa mulai diterapkan, dan mulailah Pemerintah Hindia Belanda membuka perkebunan-perkebunan dengan mempekerjakan para penduduk pribumi sebagai tenaga upahan yang sangat murah untuk perkebunan. Tanaman wajib terbesar di Bagelen pada saat itu adalah tanaman nila atau indigo, atau sering disebut juga dengan nama *tarum*, jenis tanaman yang menghasilkan bahan pewarna untuk kain.

Dengan gagalnya sistem sewa tanah atau pajak tanah yang diperkenalkan oleh Raffles, pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengangkat Gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Johannes Van Den Bosch, yang disertai tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama sistem sewa tanah berlangsung. Sistem tanam paksa ini sebenarnya diupayakan kembali untuk mengatasi hutang pemerintah yang semakin meninggi, yang tidak mampu ditanggulangi oleh keuangan Negeri Belanda, oleh karena itu pemerintah kolonial berupaya mencari penanggulangannya dengan mencari-cari keuntungan di tanah koloninya. Untuk itulah Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) ini diterapkan kembali. Dalam hal

---

<sup>35</sup> Lihat Noegroho Notosoesanto (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia IV*, 1984, hlm. 87-95.



ini Bagelen mempunyai peran yang sangat penting bagi Pemerintah Hindia Belanda karena hasil tanaman Indigo di Bagelen termasuk tanaman ekspor yang paling tinggi di Jawa pada saat itu,<sup>36</sup> sebelum dihapus karena ditemukannya bahan pewarna buatan oleh PT. Bayer sekitar tahun 1870-an.

Sistem Tanam Paksa ini sebenarnya serupa dengan sistem yang diterapkan VOC dulu, yakni dengan penyerahan-penyerahan wajib (semacam upeti). Ciri utama dari sistem ini adalah diwajibkannya para petani atau rakyat pribumi Jawa untuk membayar pajak berupa barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka dan bukan dalam bentuk uang seperti yang diterapkan pada masa sistem sewa tanah. Selain sebagai penghasil tanaman Indigo yang paling tinggi, para petani di Bagelen ini juga menanam padi, kelapa, dan umbi-umbian. Untuk hasil tanaman ini mereka diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil tanamannya sebagai penyerahan wajib atau pengganti pajak.

Menurut ketentuan pokok dari sistem tanam paksa, setiap persetujuan yang diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian dari tanah pertanian mereka, untuk penanaman tanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa unsur paksaan, akan tetapi kenyataannya seluruh pelaksanaan penanaman didasarkan atas unsur paksaan.<sup>37</sup> Pelaksanaan sistem ini menjadi semakin tidak terkontrol, dan penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi dilakukan oleh pegawai-pegawai setempat, dan akhirnya pelaksanaannya tergantung oleh pejabat-pejabat setempat.

Karesidenan Bagelen, sebagai penghasil tanaman nila (Indigo) yang paling tinggi di Jawa mempunyai beban yang cukup berat, karena daerah penghasil tanaman tersebut biasanya merupakan daerah yang mengalami tekanan-tekanan yang paling berat, karena tanaman Indigo merupakan tanaman yang harus diawasi selama tujuh bulan terus-menerus. Hal ini mungkin menjadi beban bagi para laki-laki, karena sering kali mereka datang dari distrik-distrik yang jauh terpaksa harus meninggalkan keluarga mereka dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga sawah-sawah mereka sering tidak terurus dan tidak menghasilkan mata pencaharian, karena mereka dilarang keras untuk meninggalkan pekerjaan, selama bertugas mengawasi tanaman Indigo.

<sup>36</sup> P.J. Veth, *op. cit.* hlm. 522-523. Lihat Didien Ngadiem, *op. cit.*, (1993), hlm. 109.

<sup>37</sup> *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22.

Di beberapa bagian daerah, distrik ataupun onderdistrik di Bagelen keadaan semacam ini mungkin saja terjadi, terlebih lagi mengingat jumlah besar petani yang hidup di bawah garis kemiskinan atau sangat miskin yang mencapai 40,15%, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki tanah,<sup>38</sup> seperti halnya para petani yang tinggal di daerah rawa-rawa, yakni Wawar atau rawa Tambak Baya. Bagaimanapun juga sistem ini ikut mengubah pola kehidupan para petani dari pola pertanian sawah ke pertanian perkebunan dengan sistem upah. Dengan berlakunya sistem ini menambahkan kesibukan para petani untuk mempertinggi penghasilan, baik hasil bumi maupun penghasilan tambahan di waktu-waktu luang, yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Hasil kerja sampingan di rumah merupakan suatu keuntungan tersendiri di luar hasil pertanian dan perkebunan yang sangat tergantung pada aturan-aturan pemerintah yang sangat mengikat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada tahun 1870 yang mengatur tentang tata guna tanah, maka periode selanjutnya dapat ditandai sebagai masa ekonomi liberal (1870-1950). Periode ini boleh disebut sebagai masa transisi yang semakin mengarah kepada sistem ekonomi yang lebih modern yang sebenarnya pernah dikenal sebelumnya pada masa sistem sewa tanah.

Pada masa sistem ini sudah muncul ide-ide liberal yang mulai dicoba untuk diterapkan oleh Raffles dalam bentuk kebebasan memilih untuk menanam tanaman dagang bagi para petani. Sistem tersebut ternyata gagal karena banyak terjadi kesenjangan-kesenjangan. Banyak hal-hal baru yang muncul dan tidak dimengerti oleh masyarakat petani, selain juga tidak nyamannya para penguasa tradisional yang merasa terancam posisinya dengan diterapkannya sistem baru tersebut, karena mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil untung dari para petani di bawah kekuasaannya.

Ketika diterapkannya sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) yang sebenarnya tidak jauh beda dengan sistem yang diterapkan VOC pada saat itu muncul lagi bentuk ketidakpuasan oleh para ahli kolonial, dan lebih-lebih lagi bagi para petani yang mengalami pemelaratan secara sistematis. Para kritikus tanah jajahan mulai mengkritik keberadaan sistem tersebut yang dianggapnya tidak membawa kemakmuran yang

---

<sup>38</sup> Irawan, "Pertanian dan Perekonomian Petani: Studi Ekonomi Pedesaan Purworejo, 1870-1930" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 1, No. 1, 1997, hlm. 15-25.

merata. Hal itulah yang nantinya mengakibatkan kemiskinan dan gagalnya sistem yang sudah diterapkan.

Dari kesadaran semacam inilah awal mula munculnya sistem liberal, modal swasta diberi peluang yang seluas-luasnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan besar di Jawa maupun di luar Jawa. Selama ini pihak-pihak swasta Belanda maupun pengusaha Eropa lainnya mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan perusahaan perkebunan ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Agraria. Di satu pihak Undang-Undang ini melindungi hak milik para petani pribumi atas tanah mereka, di lain pihak undang-undang tersebut membuka peluang bagi pihak swasta asing untuk menyewa tanah dari rakyat pribumi.

Masuknya ekonomi modern ini juga ditandai dengan adanya penetrasi ekonomi uang melalui sistem upah atau gaji, sewa tanah, pasar atau perdagangan. Penetrasi ekonomi uang mulai merambah masyarakat Indonesia, tidak ketinggalan pula masyarakat Jawa di Bagelen. Melalui penyewaan tanah oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar tersebut masyarakat mulai bergerak dengan ekonomi uang. Selain tanah-tanah kosong, tanah yang disewakan juga meliputi tanah persawahan. Dengan sistem penanaman silih musim ini memberi kesempatan kepada petani atau penduduk untuk bekerja menjadi buruh harian atau musiman di perkebunan-perkebunan besar untuk memperoleh uang tambahan.

Pengaruh ekonomi liberal ini tidak saja terjadi pada tanaman-tanaman perkebunan besar, tetapi juga dengan adanya barang-barang impor dari luar negeri yang dihasilkan oleh industri-industri yang sedang berkembang di negeri Belanda. Membanjirnya barang-barang impor ke Indonesia ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi usaha-usaha kerajinan rakyat yang tidak dapat bersaing dalam harga maupun kualitas dengan barang-barang dari luar.

Berkembangnya ekonomi uang di masa liberal ini juga ditandai dengan dimulai dibukanya bank-bank di Jawa (*Javasche Bank*) yang dibentuk mulai tanggal 1 April 1870.<sup>39</sup> Sebagai masyarakat pribumi sudah mulai melakukan investasi dalam bentuk uang, dan mereka pun mulai menyimpan uang di Bank-Bank Jawa. Perkembangan semacam

---

<sup>39</sup> *Staatsblad van Nederlands-Indie* No.34, *Javasche Bank, Oorkroot en Reglement*, 1870, hlm. 257.

ini benar-benar merupakan perubahan yang cukup drastis dari segi sosial ekonomi, jika dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya, atau sebelum perang Jawa. Setidaknya, dapat dikatakan di sini bahwa kekalahan dalam perang Jawa telah mengantarkan masyarakat Bagelen ke proses-proses perubahan sosial ekonomis maupun budaya secara dinamis.

Hal lain yang mengiringi pengaruh proses liberalisasi ekonomi adalah semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga semakin kuatnya sistem kerja modern yang sesuai dengan kebebasan manusia, yakni sistem upahan. Walaupun demikian kebebasan di sini bukan sesuatu yang tanpa masalah, karena meskipun sistem upahan mencirikan kebebasan manusia, namun hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang aneh dan tidak sesuai dengan pola hubungan sosial masyarakat Indonesia pada masa sebelumnya. Pola hubungan yang merupakan untuk kontribusi kerja kolektivitas atau pengabdian yang dilakukan oleh tatanan otoritas tradisional. Bagaimanapun sistem kerja tradisional dengan sistem upeti merupakan realitas historis yang sudah berlaku sejak lama. Apa yang diterapkan oleh raja-raja Mataram seperti halnya yang dilakukan oleh sultan Agung yang mengenakan pajak dalam urutan waktu panen, merupakan satu contoh riil dari sistem tersebut.<sup>40</sup>

Dengan diberlakukannya sistem liberal, pola hubungan kerja semakin menjauh dari sistem lama, walaupun sistem upahan sudah dimulai semenjak masa tanam paksa tetapi pengaruhnya belum seberapa karena bentuk-bentuk tradisional masih nampak, namun sistem liberal benar-benar merupakan sesuatu yang sama sekali baru dan sangat mempengaruhi perubahan pola hubungan kerja masyarakat petani. Salah satu pengaruh lain dari proses perubahan pada masa sistem liberal, yang berkaitan langsung dengan masyarakat petani perkebunan di Bagelen adalah industrialisasi, seperti ditemukannya bahan pewarna sintetis oleh PT. Bayer. Karena harganya jauh lebih murah dibanding nila atau indigo mengakibatkan perusahaan bahan pewarna dari tanaman nila tersebut harus mengalami gulung tikar, karena sudah tidak lagi jual. Tragedi ini menyebabkan tanaman nila tidak dapat dipertahankan lagi, dan lama kelamaan mengalami penurunan, hingga areal tanah di Bagelen yang

---

<sup>40</sup> B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies: Tulisan pilihan tentang Indonesia oleh pakar Belanda vol. II*, Den Hag/Bandung: 1955), hlm. 250.

semula dijadikan perkebunan nila milik swasta akhirnya harus dihapuskan dan diganti dengan tanaman-tanaman lain. Demikian juga tanaman nila milik pribadi harus dihapus, dan mereka terpaksa harus menjadi buruh upahan. Hanya beberapa perkebunan nila milik pemerintah saja yang masih bertahan dan sedikit mengalami kenaikan. Hal ini juga disebabkan karena ditutupnya perkebunan milik swasta.<sup>41</sup>

Dengan dihapusnya tanaman perkebunan nila atau indigo tersebut banyak lahan perkebunan yang akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah, sehingga hal ini mengurangi pendapatan bagi penduduk setempat yang semula bekerja sebagai kuli perkebunan. Kasus ini sedikit banyak ikut mempengaruhi perubahan pola kegiatan masyarakat petani sehari-hari. Meskipun masyarakat petani Bagelen sudah mulai hidup dengan sistem upah berupa uang (Ekonomi Uang) namun karena berubahnya pola kegiatan ekonomi dengan dihapusnya perkebunan indigo, mereka harus lebih giat dengan kegiatan pertanian milik sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan menjadi buruh harian untuk menambah penghasilan keluarga. Terlebih lagi bagi mereka petani yang tidak memiliki tanah sama sekali (*tlisor*) baik sebagai lahan pertanian maupun untuk sekedar tempat tinggal.<sup>42</sup>

## F. PENUTUP

Bagelen sebagai bekas wilayah negaragung Kasultanan Mataram Islam (*Vorstenlanden*) dan bekas wilayah Monconegoro dari masa dua kerajaan kembar Kasultanan Mataram di Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, ternyata memang memiliki daya tarik tersendiri. Wilayah subur di kawasan Jawa Tengah bagian selatan ini terus menjadi lahan yang diperebutkan oleh para elite politik. Tidak heran jika wilayah juga menjadi incaran para penguasa atau pemilik modal swasta untuk menguasainya. Berbagai daya tarik yang dimilikinya ini praktis tidak pernah membawa kemakmuran bagi penduduknya, tetapi justru menjadi sumber pemiskinan masyarakat. Kawasan yang merupakan lumbung padi pada masa Kasultanan Mataram (*Vorstenlanden*) maupun masa Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta ini pada masa kekuasaan pemerintah kolonial

---

<sup>41</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 86.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

Hindia Belanda juga menjadi kawasan perkebunan yang menghasilkan tanaman ekspor yang memberikan keuntungan sangat besar bagi pemerintah kolonial di negara Belanda.

Perubahan-perubahan kebijakan dari penguasa yang datang silih berganti hanya menjadikan kawasan ini sebagai komoditi politik ekonomi yang tak henti-hentinya dan menjadikan masyarakat para petani semata-mata hanya semacam alat memproduksi kekayaan bagi para penguasa yang sedang memerintah, baik penguasa lokal maupun penguasa asing. tidak heran juga bahwa di kawasan ini pun sering memunculkan gejolak politik yang mampu melahirkan perlawanan terhadap penguasa, walaupun perlawanan tersebut sering kali juga digerakkan oleh kepentingan-kepentingan politik para penguasa. Walaupun demikian kawasan ini memang tercatat memiliki cerita sejarah kepahlawanan yang bernuansa spiritual mistis dan keagamaan. Salah satunya adalah cerita kepahlawanan Pengeran Diponegoro, tokoh spiritual Jawa Islam yang sempat merepotkan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Peristiwa perlawanan tersebut jugalah yang nampaknya mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial yang terus berubah-ubah. Dari sistem tanam paksa hingga diterapkannya sistem ekonomi liberal yang tidak pernah membawa perbaikan bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat petani yang sejak masa prakolonial merupakan identitas bagi kawasan tersebut. sebagaimana dituliskan dalam Babad Tanah Jawi, bahwa kawasan Bagelen adalah kawasan kekuasaan Raja Petani dari Kerajaan Purwo Carito. Hal ini mengesankan bahwa Bagelen adalah memang adalah kawasan yang sangat subur hingga menjadi lahan sumber perebutan kekuasaan oleh para elite politik dari masa ke masa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.J. van der Aa. *Nederlandsch Oost-Indie-Beschrijving Der Nederlnadsche-Bezittingen in Oost-Indie*. Amsterdam: J.F. Schleijer, 1851.
- Algemeen Verslag der Residensi Bagelen over het Jaar 1860*. (Purworejo: De Residen van Bagelen den 12 Februari), Eerste Afdeeling-Algemeen Bestuur, B., Bevolking, Bagelen No. 4/1.
- Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1865*. Batavia: Ter Land-Drukkerij, 1865.
- ANRI Jakarta. *Bagelen 1831, 5/10, Verslag der Handelingen van de Komissaris Voor ou Overgenomen Vorstenlanden*, Lawick van Pabst, 1831.
- Arsip Djogja. *Original Contract tuschen het Gouverneur Nicolas Harting van Wegen de Generale Nederlandsche oost-Indiesche Compagnie en den Sultan Hamengcuboeana (Hamengku Buwono) Campemen tot Gantie: 13 Februari 1755*
- Arsip Djokja No. 11/3. *Rapport van den Resident van Kedoe aan Heeren Komissarissen ter Regeling der Zaken In den Vorstenlanden, Heudende Verslag van zijn Verplichtingen in Bagelen*. (Kedoe: De Resident. De dato 18 September 1830).
- B. Schrieke. *Indonesian Sociological Studies: Tulisan Pilihan tentang Indonesia oleh Pakar Belanda vol. II*, Den Hag/Bandung: 1955.
- Babat Tanah Jawi, Poeniko Serat Babat Tanah Jawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Tahun 1657*. S-Gravenhage: M, Nijhoff, 1941.
- CL. Van Doorn. *Schets van de Ecomische Ontwikkeling der Afdeeling Poerworejo (Residentie Kedoe)* Weltevreden: G. Kolff's Co., 1926.
- D.H. Burger. "Structuurveranderingen in de Javaansche Samenleving", *Indonesie*, III (1949-1950)
- Dalam Babad Giyanti daerah Remo dinamakan Roma, R Ng. Jasadipura I. *Babad Giyanti, Pratelaan Namaning Tiyang lan Panggenan*, Batavia:-Bale Poestaka, 1939, Serie No.1257.U
- Didien Ngadinem. "Perkembangan Daerah Karesidenan Bagelen pada Pertengahan Abad XIX: sebuah Studi Sejarah Ekonomi" Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1993.

- Doorn. C.L. *Schets van De Economische Ontwikkeling der Afdeeling Poerworejo (Residentie Kedoe)* Weltevreden, G.Kolffs Co., 1926: 17, dikutip dari PM. Laksono, *Tradition in Javanese Social Sturcture Kingdom and Countryside*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1990.
- Geertz, Clifford. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1983), hlm. 102.
- Geertz, Clifford. *The Social Context of Economic Change: An Indonesian Case Study*. Cambridge: Cambridge University Press, 1956.
- GP. Rouffer. "Voorstenlanden" Adatrechtbundels XXXIX, seri D, no. 18.
- Irawan, "Pertanian dan Perekonomian Petani: Studi Ekonomi Pedesaan Purworejo, 1870-1930" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 1, No. 1, 1997.
- JH. Houben Vincent. "Economic Policy In the Principalities of Central Java in Nineteenth Century ", in Angus Maddison dan De Prince (ed.) *The Growth in indonesia 1820-1940*. Dordrecht, Foris Publication, 1989.
- JL.A. Brandes. *Register op de Proza Omzetting van De Babad Tanah Djawi* (Uitgave van 1794), VBG, 1900.
- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Kartodirdjo, Sartono. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Kartodirdjo, Sartono. "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial", Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra UGM, dalam *Lembaran Sedjarah* No. 4, 1969.
- Kartodirdjo, Sartono. *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, (Ed.), cet. Ketiga. Jakarta: LP3ES, terj. Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Kartodirdjo, Sartono. *Lembaran Sejarah* No. 8, "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada abad 19 dan 20", Cet. Kedua, Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Juni, 1972.
- Koentjaraningrat, R.M. "The Javanese of South Central Java" dalam G.P. Murdoch (ed.) New York: 1960.
- Laksono. *Tradition in Javanese Social Structure Kingdom and Countryside*. Yogyakarta: Gama Press, 1990.
- Notosoesanto, Noegroho (Ed.). *Sejarah Nasional Indonesia IV*, 1984.



- P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistische Wordenboek van Nederlandsch-Indie*. (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1961). Eerste dell, A-J, hlm. 48-49. Lihat Juga ANRI, *Bagelen no 5/10 1930, Verslag der Handelingen van de Komissaris voor der overgenomen vorstenlanden Lawick Pabs, 1831*.
- Paulus, B. *Encyclopaedia van Nederlands-Indie*. ('S Gravenhage: Martinus Nijhoff-Leiden: N. V v/h. E. J. Brill, 1917), Eerste Deel A -C.
- Regering Almanak van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1890*. Batavia: Ter Land Drukkerij, 1890.
- Satu Paal= 15,6.943 m, lihat ENI, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Tweede druk. J.Paulus (ed.). 'S Gravenhage dan Leiden; Martinus Nijhoff dan N.V./HE. J. Brill. Paal, hlm. 226.
- Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22.
- Staatsblad van Nederlands-Indie* No.34, *Javasche Bank, Ooktrooi en Reglement*, 1870.
- TNI, 1858 "De Toestand van Bagelen in 1830" *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, 20<sup>st</sup> Jaargang II.
- Van den Berg, L.W.C. *De Indlandsche Titels end Rangen op Java en Madura*. Den Haag: 1902.
- Wertheim, W.F. *Indonesian Society in Transition*, terj. Te Hague: 1959.